

Nama : Sinthia Wardani

NPM : 2313031063

Kelas : C

Mata Kuliah : UAS Ekonomi Pendidikan

Dosen Pengampu : Dr. PUJIATI, M.Pd., Dr. MEYTA PRITANDARI, M.Pd., FANNI RAHMAWATI, M.Pd.

PETUNJUK: Kerjakan soal berikut dengan benar.

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan Kasus

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawab:

1. a. Penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut belum bisa dikatakan efisien. Dari sisi efisiensi internal, pembangunan gedung sekolah memang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah karena akses pendidikan menjadi lebih mudah. Namun, kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan lebih banyak menghasilkan peningkatan

jumlah peserta didik dibandingkan peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, dari sisi efisiensi eksternal, pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Karena pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran masih terbatas, kualitas lulusan yang dihasilkan juga belum optimal sehingga manfaat pendidikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial daerah menjadi kurang maksimal.

b. Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan gedung sekolah berdampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan, tetapi kurang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, banyak siswa yang dapat bersekolah, tetapi kemampuan akademik, keterampilan berpikir kritis, dan literasi digital mereka belum berkembang secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuat lulusan kurang siap menghadapi tuntutan dunia kerja dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperbaiki kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, serta memperluas penggunaan teknologi dan media pembelajaran digital sehingga kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara bersamaan.

2. a. Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan dalam hal sarana dan prasarana, kualitas guru, serta akses terhadap teknologi. Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti laboratorium, internet yang memadai, dan tenaga pendidik yang lebih profesional, sedangkan sekolah di pedesaan masih menghadapi kekurangan guru, fasilitas yang terbatas, dan akses teknologi yang rendah. Perbedaan ini menyebabkan kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi tidak merata, sehingga hasil belajar dan prestasi akademik siswa di desa cenderung lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

b. Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang yang cukup besar. Siswa dari daerah pedesaan berisiko memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih rendah sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik juga lebih kecil. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antara masyarakat desa dan kota dapat semakin melebar serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, daerah pedesaan dapat mengalami kesulitan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan. Untuk mengurangi

ketimpangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan, memperluas akses internet dan teknologi pembelajaran, memberikan insentif bagi guru agar bersedia mengajar di daerah terpencil, serta memperkuat program pelatihan guru dan bantuan pendidikan sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

3. a. Berdasarkan teori *human capital*, pendidikan merupakan investasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang agar memiliki nilai lebih di pasar kerja. Pada kasus ini, pengangguran terdidik terjadi karena kompetensi yang dimiliki lulusan belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Meskipun jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, keterampilan yang mereka pelajari belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan perusahaan, maupun tuntutan dunia kerja saat ini. Akibatnya, lulusan kesulitan bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya.

b. Kasus tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara pendidikan dan pasar kerja. Pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, tetapi dalam kenyataannya banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka pengangguran terdidik dan banyak lulusan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Untuk meningkatkan relevansi lulusan, perguruan tinggi perlu memperkuat kerja sama dengan dunia industri dalam penyusunan kurikulum, memperbanyak program magang dan praktik kerja, meningkatkan pelatihan keterampilan digital dan soft skills, serta melakukan evaluasi kurikulum secara berkala agar materi yang diajarkan selalu sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, lulusan akan lebih siap memasuki dunia kerja dan memiliki peluang kerja yang lebih besar.

4. a. Kasus tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sebagai barang privat, pendidikan memberikan manfaat langsung kepada individu, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Karena itu, universitas merasa wajar jika biaya kuliah dinaikkan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan yang diterima mahasiswa. Namun, pendidikan juga merupakan barang publik karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia, produktivitas, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ketika biaya pendidikan terlalu tinggi, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pendidikan dapat berkurang sehingga tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang tercapai.

b. Kenaikan biaya pendidikan sebesar 25% dapat menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomi. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya kuliah yang semakin mahal dapat menjadi beban keuangan yang berat, bahkan berisiko membuat sebagian mahasiswa menunda atau menghentikan pendidikan mereka. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu. Dalam jangka panjang, kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan menjadi semakin terbatas bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat semakin meningkat.

c. Pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan memiliki manfaat yang luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Intervensi tidak harus berupa pembatasan biaya kuliah secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, subsidi, atau program pinjaman pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Dengan adanya intervensi tersebut, akses terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka bagi semua lapisan masyarakat meskipun terjadi kenaikan biaya kuliah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi agar kenaikan biaya pendidikan dilakukan secara wajar dan benar-benar diikuti oleh peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.

5. a. Kasus tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembelajaran menimbulkan tambahan biaya pendidikan yang harus ditanggung siswa dan keluarganya, seperti biaya pembelian gawai, laptop, serta kuota internet. Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, biaya tersebut menjadi beban yang cukup besar sehingga menghambat akses mereka terhadap pembelajaran. Selain itu, terdapat opportunity cost atau biaya peluang yang harus ditanggung keluarga. Misalnya, uang yang digunakan untuk membeli perangkat dan kuota internet sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, sebagian siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran digital secara optimal.

b. Kesenjangan digital dapat menyebabkan kualitas pendidikan menjadi tidak merata. Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet yang baik dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu berisiko tertinggal karena keterbatasan akses teknologi. Kondisi ini dapat menurunkan partisipasi belajar, hasil akademik, serta memperlebar kesenjangan prestasi antara siswa dari kelompok ekonomi yang berbeda. Dalam jangka panjang, kesenjangan digital juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia karena tidak semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat memberikan bantuan perangkat belajar dan subsidi kuota internet bagi siswa kurang mampu, memperluas pembangunan infrastruktur internet di daerah yang masih terbatas, serta menyediakan alternatif pembelajaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh siswa. Dengan demikian, manfaat digitalisasi pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh semua peserta didik.